

Tiga Minggu Pasca...

dapat mencapai 500 persen. Adapun di tahun ini, kenaikan paling tinggi hanya 120 persen. Namun demikian, Wiku mengatakan, pemantauan lonjakan kasus Covid-19 seharusnya tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota.

“Perlu diwaspadai bahwa kenaikan di beberapa kabupaten/kota terjadi secara signifikan,” ujarnya.

Setidaknya, terdapat 25 kabupaten/kota yang menjadi penyumbang terbesar angka Covid-19 nasional. Ke-25 wilayah itu tersebar di berbagai provinsi.

Di Jawa Tengah, kasus Covid-19 dikontribusikan oleh Kudus yang naik 7.594 persen, Jepara naik 685 persen, Sragen naik 338 persen, Kota Semarang naik 193 persen, dan Semarang naik 94 persen.

Lalu, di Kepulauan Riau kasus virus korona disumbangkan oleh Kota Batam yang naik 257 persen, Karimun naik 116 persen, Natuna naik 100 persen, Bintan naik 81 persen, dan Kota Tanjungpinang naik 13 persen.

Kemudian, kenaikan kasus Covid-19 di Sumatera Barat dikontribusikan oleh Pasaman Barat sebesar 157 persen, Agak naik 151 persen, Solok naik 128 persen, Dharmasraya naik 125 persen, dan Kota Padang naik 75 persen.

Berikutnya, kasus Covid-19 di DKI Jakarta dikontribusikan Jakarta Selatan naik 92 persen, Jakarta Timur naik 67 persen, Jakarta Pusat naik 57 persen, Jakarta Utara naik

43 persen, dan Jakarta Barat naik 42 persen.

Adapun kasus Covid-19 di Jawa Barat dikontribusikan oleh Ciamis yang naik 700 persen, Bandung naik 261 persen, Cianjur naik 188 persen, Karawang naik 152 persen, dan Cirebon naik 115 persen.

Dengan adanya data ini, Wiku meminta penanganan kasus Covid-19 di daerah ditingkatkan. Ia tidak ingin ada kepala daerah yang lambat menangani hal ini sehingga situasi kritis dapat dihindari.

“Fokus penanganannya adalah dengan menurunkan kasus sesegera mungkin dan menekan agar tidak terjadi penularan, karena apabila di kabupaten/kota ini menurun maka kasus nasional akan menurun secara signifikan,” kata Wiku.

Terjadi Lonjakan

Kasus harian Covid-10 pada Rabu (9/6) tercatat ada penambahan 7.725 kasus. Jumlah 7.725 kasus ini merupakan yang tertinggi sejak 4 Maret 2021 lalu.

Berdasarkan data di situs Covid-19, kasus baru korona pada 4 Maret 2021 sebanyak 7.264. Setelah 4 Maret 2021, kasus Corona RI belum pernah menembus angka yang sama.

Pada Rabu (9/6) kemarin, kasus harian Covid-19 di Indonesia melebihi angka pada 4 Maret 2021 tersebut, yaitu bertambah 7.725 kasus positif dalam sehari.

Jika dilihat dalam sepekan terakhir, jumlah kasus baru COVID-19 yang ditemukan di Indonesia, ini yang terbanyak. Terbanyak kedua ditemukan pada 7 Juni dengan jumlah 6.993 kasus. ● mar

Gajah ‘Patah Hati’ Hadiri...



memiliki ikatan khusus dengan Brahmadath yang kabarnya membuat penduduk setempat “iri”.

Momen luar biasa ketika Brahmadath tiba untuk pemakaman tertangkap kamera.

Saat tubuh Omanchetan tergeletak di luar rumahnya, gajah besar itu berdiri di samping pelayat sebelum menyentuh tubuh penunggangnya, atau mahout, pada saat-saat penuh perhatian.

Teman dan keluarga Mahout berteriak dengan emosi saat Brahmadath mencoba mengangkanya dengan menggoyangkan belalainya.

Omanchetan (74), meninggal pekan lalu di rumahnya di Kerala, India Selatan. Menurut mereka yang mengenalnya, dia dan Brahmadath akan menghabiskan setiap hari bersama dan memiliki hubungan yang mendalam.

“Ketika Brahmadath datang ke pemakaman, saya tidak tahan,” ujar Rajesh (50), putra mendiang.

“Mereka saling mencintai seperti apa pun. Keinginan terakhirnya adalah melihat Brahmadath,” terangnya.

“Semua orang iri dengan ikatan mereka,” lanjutnya.

“Ayah saya telah menjadi mahout dan pelatih selama hampir enam dekade dan ikut serta dalam berbagai festival untuk menarik orang banyak,” tambahya.

Gajah dianggap kerap mengunjungi sisa-sisa anggota keluarga yang meninggal, membeli tulang mereka, atau kadang-kadang bergoyang-goyang seperti berjaga-jaga.

Kawan gajah telah ditangkap di film yang tampak berduka atas kehilangan anggota yang mati selama sehari-hari, sama seperti rasa kehilangan yang dialami manusia.

Gajah dianggap sebagai salah satu makhluk terpandai di Bumi. Gajah terancam punah karena pemburu kerap membunuh mereka demi mengambil gadingnya. ● osm

Kesehatan 11

Indonesia Dinilai Laksanakan Vaksinasi dengan Optimal

Hal itu disampaikan Immunization Officer WHO Indonesia, dr. Olivi Silalahi.

JAKARTA(1M) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji langkah pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 nasional. Menurut Immunization Officer WHO Indonesia, dr. Olivi Silalahi, Indonesia menjadi salah satu negara dengan program vaksinasi sukses. Masih menurut dia tidak lepas karena komitmen Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan maksimal oleh Kementerian Kesehatan

(Kemenkes).

Indonesia, kata dia, berhasil menunjukkan langkah tegas dengan mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19 di dalam negeri.

“Urutan kedua negara yang terbanyak penduduknya yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19. Untuk negara yang belum bisa memproduksi vaksin sendiri, Indonesia sudah termasuk advance dalam melaksanakan

vaksinasi Covid-19. Tantangannya menjangkau kelompok-kelompok rentan,” kata Olivi dalam Dialog Produktif KP-CPEN dan FMB9 yang dilaksanakan secara daring kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia, Prof. Pratiwi Pudjilestari Sudarmo mengatakan, kendala yang dihadapi di lapangan terjadi karena soal penyampaian informasi. Menurut Pratiwi, kelompok masyarakat demikian lebih sering menerima efek samping vaksin yang dianggap menakutkan.

“Untuk itu kita bisa berikan penerangan. Bagaimana vaksin

bekerja, bagaimana vaksin efektif menghambat infeksi terjadi dan juga mencegah transmisi terjadi dan akhirnya mengurangi jumlah pasien,” katanya.

Selain soal komunikasi, sukses program gerakan vaksinasi nasional juga bergantung pada ketersediaan dan distribusi vaksin agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama untuk memenuhi target satu juta vaksinasi per hari.

“Kekurangannya tentunya impor yang sudah jadi dari AstraZeneca, juga tambahan dari program Gotong Royong dari Sinopharm,” kata dr. Mahsum Muhammadiyah, Kepala Divisi Ritel dan Pelayanan Bio Farma.

Saat ini, Indonesia telah mendapat pasokan 11,7 juta vaksin tambahan untuk vaksinasi tahap kedua. Menurut Kemenkes, pemerintah tahun ini menargetkan pengamanaan 340,5 juta dosis vaksin dari lima merek, yakni Sinovac (125,5 juta), AstraZeneca (59 juta), Covax (54 juta), Novavax (52 juta), dan Pfizer (50 juta).

Sampai dengan kuartal I-2022, diharapkan ada tambahan 86,3 juta dosis vaksin dari kelima produsen tersebut. Dengan demikian, pada periode tersebut diharapkan terkumpul 426,8 juta dosis vaksin untuk diberikan kepada 260 juta penduduk Indonesia. ● tom

SAMBUNGAN

rus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut di gulirkan pada masa pandemi

dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit. “Harga cabai bulan lalu hingga 100rb, harga daging sapi belum stabil mau di bebani

Sembako Bakal Kena PPN...

PPN lagi? Gila kami kesulitan jual km ekonominya menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, bagaimana tak

gulgung tikar,” bebernya.

Ikappi mencatat barang yang terkena pajak di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai,

DARI HAL 1

garam konsumsi, daging dan telur. Kemudian susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbu dan gula konsumsi. ● mar

Komnas HAM Berwenang Selidiki...

Anam menegaskan, merespons sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mempertanyakan korelasi antara TWK dan HAM. “Komnas HAM sejak 1993 didirikan salah satu mandat utamanya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan negara itu sesuai HAM atau tidak,” ujar Anam, dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Humas Komnas HAM, Rabu (9/6).

Anam menekankan, pihak pelapor berhak menentukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa. Setelah itu, Komnas HAM akan melakukan penyelidikan kemudian menyimpulkan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan itu memenuhi unsur pelanggaran HAM atau tidak.

“Jadi apakah ini pelanggaran HAM atau tidak, yang menilai pertama adalah pihak pengadu,” ungkapnya.

“Nanti setelah semua keterangan, semua fakta, semua prosedur, kita cek, kita periksa, kita uji dengan ahli baru kita simpulkan,” tegas Anam.

Apa Motif Tjahjo Kumolo?

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang juga anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyatakan, Tjahjo Kumolo sama sekali tidak punya otoritas untuk menilai pelanggaran HAM.

Usman mengatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, otoritas itu berada dalam lingkup kewenangan Komnas HAM.

“Pernyataan Tjahjo itu semakin membuat terang ihwal peta aktor-aktor di balik pelemahan KPK. Sebab, pejabat selevel menteri mustahil tidak mengetahui suatu undang-undang,” ucap Usman, dalam keterangannya, Rabu (9/6).

“Karena itu, pernyataan ini terindikasi di luar kepentingan sebagai Menpan-RB. Lalu, apa motif Tjahjo melontarkan pernyataan kontroversial tersebut?” kata Usman Hamid.

Menurut Usman, yang mestinya dilakukan Tjahjo adalah memeriksa keikutser-

taan Kemenpan-RB dalam proses peralihan ASN KPK yang tidak sesuai UU KPK hasil revisi Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kemenpan-RB bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

“Bukan justru disibukkan dengan memproduksi pernyataan kontroversial,” katanya.

Sementara itu, anggota koalisi lainnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Ansari meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil dan mengevaluasi Tjahjo. Feri mengatakan, pernyataan Tjahjo terkesan menganggap enteng polemik TWK.

Menurut dia, sebagai penyelenggara negara, Tjahjo mestinya memahami bahwa TWK yang dilakukan terhadap seluruh pegawai KPK me-

langgar hukum, mencoreng etika individu, meruntuhkan HAM, dan bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Mendesak agar Presiden Joko Widodo memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas pernyataan kontroversial yang telah ia sampaikan sebelumnya,” kata Feri.

Seperti diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK. Kemudian, 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK bakal dipecat, sementara sisanya akan dibina.

Pegawai KPK yang tak lolos melapor soal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK ke Komnas HAM. Mereka mempersoalkan dasar hukum TWK yang hanya diatur melalui Peraturan KPK.

Selain itu, sejumlah pertanyaan TWK dianggap melecehkan dan melanggar privasi warga negara. Dalam proses penyelidikan, pimpinan KPK tak memenuhi panggilan Komnas HAM dan meminta penjelasan mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelak-

sanaan TWK.

Sikap KPK ini didukung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, tidak ada kaitan antara penyelenggaraan TWK dengan pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusannya (tes) kewenangan uraian itu (dengan) urusan pelanggaran HAM?” kata Tjahjo, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6) kemarin.

Tjahjo menilai, TWK merupakan hal yang biasa. Ia membandingkan dengan pengalamannya mengikuti penelitian khusus (litsus) pada era Orde Baru. Hanya saja, menurut Tjahjo, saat ini pertanyaan yang digali dalam TWK lebih luas, tidak hanya soal keterkaitan seseorang dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Zaman saya litsus tahun 85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas, secara kompleks,” ujar Tjahjo. ● mar

Mega -Prabowo akan Dipasangkan...

(Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (Mega-Pro), tidak mau menjawabnya secara gamblang.

Menurutnya, soal koalisi ini tidak bisa berandai-andai. Tinggal menunggu waktu saja soal siapa yang akan dicalonkan PDIP kelak. “Nggak bisa

berandai-andai. Tunggu tanggal lainnya aja,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Mengenai nama Puan Maharani sebagai calon presiden (capres), Tjahjo menjelaskan, pengajuan pasangan calon (paslon) untuk Pilpres itu se-

uai dengan UU Pemilu Nomor 7/2017 adalah hak dan kewenangan parpol atau gabungan parpol.

“Karena ini adalah domain parpol untuk tentukan siapa capres. Kalau kepala daerah kan ada yang independen,” ujarnya.

Namun, Tjahjo pribadi mempersilakan siapa saja yang mau bermanuver jelang Pil-

adalah nantinya orang itu harus didukung parpol atau gabungan parpol.

“Kalau saya sah-sah aja, orang mau bermanuver silahkan saja. Tapi, nanti yang berhak usulkan capres-cawapres, bisa satu parpol atau gabungan parpol,” tegas Tjahjo. ● han

pres ini, karena nantinya yang berhak mengusulkan capres-cawapres adalah parpol dan gabungan parpol.

“Kalau saya sah-sah aja, orang mau bermanuver silahkan saja. Tapi, nanti yang berhak usulkan capres-cawapres, bisa satu parpol atau gabungan parpol,” tegas Tjahjo. ● han

Novel Baswedan Cs Laporkan...

dipercayai publik,” ujar Sujanarko melalui keterangan tertulis, Rabu (9/6).

Laporan tersebut dilayangkan pada Selasa (8/6) ke Dewas. Ada dua dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan mereka. Dugaan pelanggaran pertama ialah dugaan Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Syahril.

Lili dianggap melanggar prinsip integritas yang ada pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Prinsip integritas itu berbunyi:

Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali

dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung

Kedua, Lili dituding menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahril untuk menuntaskan urusan kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip integritas, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi:

Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi

Rizka Anungntana mengatakan bersedia menjadi saksi terkait dugaan ini. Pasalnya, ia merasa memiliki banyak infor-

masi terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. “Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya kami menduga atau setidaknya patut menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh LPS,” kata Rizka.

Jika memang tidak terbukti, Novel meminta Dewas berani mengumumkan kepada publik soal dugaan ini, sehingga KPK akan bebas dari stigma adanya kebiasaan yang tidak benar dalam penanganan perkara.

“Ini penting dan berdampak besar bagi keberlangsungan KPK dan merupakan isu yang menyangkut roh dan jiwa, harkat, dan martabat KPK sebagai lembaga penindakan tindak pidana korupsi,” kata Novel.

Lili Membantah

Sebelumnya, Lili telah menepis tuduhan komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril terkait kasus yang

sedang diselidiki KPK. Lili menepis membantu Syahril.

“Dapat kami sampaikan bahwa saya tegas mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan,” ucap Lili dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4) lalu.

“Apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” imbuhnya.

Lili menyadari posisinya sebagai pimpinan KPK dibatasi dengan aturan-aturan etik. Dia memastikan integritasnya sebagai pimpinan KPK terjaga.

“Dan saya juga sangat menyadari bahwa sebagai insan KPK saya tentu terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berperaka. Akan tetapi sebagai pimpinan KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas pencegahan saya

tentu tidak dapat menghindari komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan komunikasi yang terjaln tentu saja terkait dengan tugas KPK dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi,” kata Lili.

“Posisi saya memang sebagai pejabat publik sebelum bergabung di KPK ini membuat saya telah memiliki jaringan yang cukup lumayan luas dan hubungan silaturahmi itu tetap terjalin tapi dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh aturan. Dalam komunikasi saya dengan siapapun juga khususnya terhadap pejabat publik selalu juga saya mengingatkan untuk selalu bekerja dengan baik dan hindarilah tindak pidana korupsi dan saya juga selalu menjaga selektivitas untuk berkomunikasi, menjaga harkat dan martabat diri saya sebagai insan KPK maupun sebagai marwah lembaga KPK,” tandasnya. ● mar

Pecahkan Rekor Dunia, Wanita...

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia “bahagia” dan “emosional” dalam sebuah pernyataan singkat yang dikeluarkan tadi malam.

Kelahiran kembar yang ekstrem itu sempat dikaitkan dengan perawatan kesuburan, namun Sithole menyatakan kehamilannya sepenuhnya alami.

“Ini tujuh laki-laki dan tiga perempuan. Dia hamil tujuh bulan tujuh hari,” terang Teboggo kepada outlet berita lokal Pretoria News.

“Saya senang. Saya emosional. Saya tidak bisa bicara banyak,” ujarnya.

Dokter awalnya percaya jika Sithole sedang mengandung enam bayi, dan Teboggo mengatakan pada saat itu bahwa dia menemukan hal yang tidak dapat dipercaya.

“Tetapi setelah saya mengetahui bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi, dan melihat catatan medis istri saya, saya menjadi bersemangat. Saya tidak sabar untuk memiliki mereka di tangan

saya,” lanjutnya.

Sithole mengatakan kepada wartawan bahwa kehamilan itu tidak mudah. Dia bilang dia mengalami morning sickness yang ekstrem sejak dini, dan nyeri kaki saat berjalan semakin besar.

Kesehatan bayi belum diungkapkan. Proses kelahiran itu terjadi hanya sebulan setelah Halima Cisse dari Mali melahirkan sembilan anak. Wanita berusia 25 tahun itu diterbangkan ke Maroko pada Maret lalu

untuk perawatan spesialis setelah pemerintah Mali surut tangan untuk membantunya.

Bahaya kematian bayi dalam kasus kelahiran kembar bisa tinggi. Suami Halima, Kader Arby, mengaku yakin kesembilan bayinya akan baik-baik saja. “Saya tidak khawatir tentang itu. Ketika Yang Mahakudsa melakukan sesuatu, Dia tahu mengapa,” terangnya.

Dalam wawancara terbaru sepuluh tahun setelah dia melahirkan delapan bayi,

“Octomom” kontroversial Nadya Suleman mengatakan bahwa saat dia “muda, bodoh, tidak bertanggung jawab, egois dan sembrono”, namun dia tidak menyesali kehadiran anak-anaknya.

Di wawancara itu dia mengungkapkan dirinya menjalankan peraturan yang tepat dan disiplin seperti militer untuk mengatur anak-anaknya di rumah. Dia menjelaskan, anak-anaknya bahagia, sehat, dan sopan. ● osm

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularto.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularto.
ARTISITIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen), **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzili), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro), Riston Pardamean Lubis, Kartoni Lubis.
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500/leks (di luar kota Rp 3.000/leks), Harga Langganan Rp 50.000/ Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Telp : 021-6265566 pesawat 4000
 Fax : 021-639 7652.
 Twitter: International Media @redaksi_IM